



SOLUSI PASAR KEMBANG, PEMKOT DIDESAK TEGAS

Konsep Tak Jelas, Muncul Opsi Mosi Tidak Percaya

YOGYA (KR) - Kalangan DPRD Kota Yogya menganggap serius polemik yang terjadi di Pasar Kembang. Bahkan opsi mosi tidak percaya turut diwacanakan manakala tak ada kejelasan mengenai solusi bagi pedagang usai ada penataan dari PT KAI Daop 6 Yogya.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya, Nasrul Khairi menjelaskan, hak konstitusional dari sisi fungsi pengawasan akan ia pergunakan. "Ada beberapa langkah pengawasan, salah satunya mosi tidak percaya. Tapi perlu dilihat tahapan-tahapannya. Yang jelas, kami akan awali dengan klarifikasi kepada walikota terlebih dahulu. Jika jawabannya tidak memuaskan, baru kami gunakan hak berikutnya," urainya usai menerima audiensi para eks pedagang di Jalan Pasar Kembang Kamis (3/8).

Polemik di Pasar Kembang tersebut dipicu dengan terbitnya Perwal 51/2017 yang sudah tidak mencantumkan Pasar Kembang dalam daftar pasar tradisional di Kota Yogya. Salah satu dasar penghapusan Pasar Kembang tersebut ialah surat dari PT KAI terkait rencana penataan.

Selain itu, hasil dari pantauannya, sejauh ini belum ada konsep yang jelas dan terukur dari Pemkot Yogya atas nasib para pedagang resmi di Pasar Kembang tersebut. Padahal, kalangan dewan pernah mengusulkan supaya ada tim khusus yang dibentuk seiring penataan yang dilakukan oleh KAI. "Kami melihat ada kelalaian yang dilakukan oleh Pemkot Yogya jika berdasarkan penghapusan Pasar Kembang lantaran berkaitan alas hak. Karena beberapa pasar tradisional sekarang ini juga berdiri di atas alas hak Sultan Ground," tandasnya.

Oleh karena itu, kalangan dewan belum bisa mengambil kesimpulan atas hak konstitusional yang hendak digulirkan. Lain halnya jika hasil klarifikasi dengan walikota ditemukan jawaban yang tegas dan jelas, maka semua pihak harus saling menghargai. Tapi jika sebaliknya, selain opsi mosi tidak percaya juga ada wacana hak angkat serta membentuk panitia khusus (pansus).

Sementara Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi menilai, penghapusan Pasar Kembang dari daftar pasar tradisional mempertimbangkan kondisi faktual yang ada saat ini. Kendati begitu, dirinya menampilkan ada pembaruan yang dilakukan pemerintah terhadap pedagang resmi yang kini nasibnya terkatung-katung.

Menurut Heroe, Pemkot Yogya tengah menjalin koordinasi dengan PT KAI Daop 6 Yogya untuk penyediaan lokasi untuk aktivitas perdagangan. Kepastian itu pun masih dalam proses konsultasi yang dilakukan oleh Daop 6 ke KAI Pusat selaku pemegang kebijakan.

"Kami minta semua bersabar. Ada sejumlah solusi yang kami pertimbangkan, tapi kan tidak bisa saat ini juga dieksekusi karena berhubungan dengan instansi lain," katanya.

Sedangkan Ketua Paguyuban Manunggal Karsa, Rudi Tri Purnama menilai tidak ada kejelasan dari pemerintah atas persoalan yang dihadapi oleh para pedagang. Dirinya pernah dipanggil untuk berdialog dengan walikota namun tidak ada solusi yang ditawarkan.

(Dhi)-o

Yogyakarta,

Instansi	Tindak Lanjut
1.	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005